Menata Ulang Peran Hutan Rakyat dalam Pembangunan Berkelanjutan Indonesia | Hal 10

3 5 4 6 8 9 5 0 1 8 7 8 4

Edisi Januari 2026
Majalah Berita Triwulan
ISSN: XXXX-XXXX-XXXX

FOREST CULTURE

Hutan Wakaf Sebagai Alternatif Pengelolaan Sumber Daya Berkeadilan dan Lestari | Hal 3



TENTANG FOREST CULTURE

FOREST CULTURE merupakan jenama majalah independen terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pendidikan dan gaya hidup. Majalah ini diterbitkan oleh Lembaga Alam Tropika Indonesia sejak September 2006. Saat itu Arif Aliadi (almarhum) sebagai *Chief Editor*; Rosita Dewi sebagai *Managing Editor*; I.G.G. Maha Adi, Heru Pramuji, Lis Hendriani sebagai *Senior Editor*; Sri Nuryani sebagai *Research and Distribution*; Nana Rusyana sebagai *Art and Design*; Rudi Novira sebagai *Marketing and Photo Editor.*

Majalah ini setidaknya telah mencetak beberapa edisi sampai pada akhirnya vakum di tahun 2009. LATIN pada tahun 2025 menghidupkan kembali jenama majalah FOREST CULTURE dalam bentuk *digital (E-Magazine).* Harapannya, majalah digital ini dapat dijangkau oleh berbagai pihak di belahan bumi manapun. Tidak melupakan niat awal lahirnya majalah ini: "mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari", FOREST CULTURE kembali muncul ke permukaan media dengan versi *digital* dan masih dengan semangat serta tujuan yang sama.

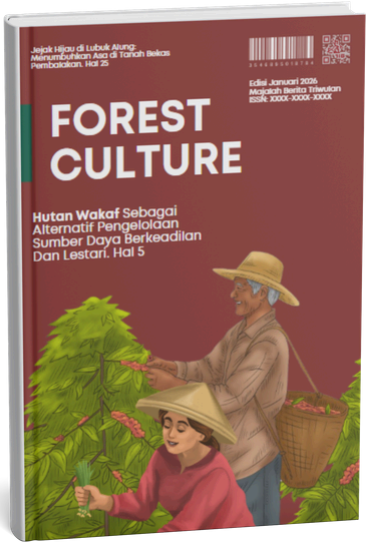
Edisi kedua E-Magazine FOREST CULTURE mengangkat tema **"Hutan Wakaf, Hutan Rakyat, dan Hutan Adat"** sebagai penegasan atas hak kelola masyarakat dalam menjaga hutan. Di tengah sejarah kebijakan kehutanan yang lama menempatkan hutan sebagai komoditas, ketiga konsep ini menawarkan arah alternatif: hutan sebagai amanah, ruang hidup, dan warisan pengetahuan yang dikelola secara adil dan lestari. Edisi ini menghadirkan beragam pandangan dan pengalaman untuk memperkuat peran masyarakat dalam masa depan kehutanan Indonesia.

Alamat Redaksi
Pendopo LATIN, Jl. Sutera no. 1 Rt 02/05
Situgede Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia – 16115
0813 1116 2045

Email Redaksi : forestculture@gmail.com
Website : http://www.latin.or.id

Penasehat Tri Nugroho, Dwi Rahmad Muhtaman **Penanggung Jawab** Thomas Oni Veriasa, Febri Sastiviani Putri Cantika **Pemimpin Redaksi** Annisa Aliviani **Redaktur Pelaksana** Taufik Saifulloh, Dicka Prawira **Redaktur** Febri Sastiviani Putri Cantika, Novan Aji Imron **Asisten Redaktur** Siti Nurjanah **Keuangan** Isa Zaenal **Ilustrator** Alwi, Hydric Creative Hub

DAFTAR ISI



Laporan Utama
Hal 3

Hutan Wakaf Sebagai Alternatif Pengelolaan Sumber Daya Berkeadilan dan Lestari

Ketika krisis iklim tak lagi soal "umat manusia", kapitalisme sebagai akar masalah dan hutan wakaf sebagai alternatif radikal berbasis Islam untuk memulihkan hubungan manusia dan alam secara adil dan lestari.

Community & Culture
Hal 14

Jejak Hijau di Lubuk Alung: Menumbuhkan Asa di Tanah Bekas Pembalakan

Dulu ditebang demi hidup, kini dijaga demi masa depan. Apa yang membuat warga Lubuk Alung berani membalik takdir hutannya?

Sikerei: Penjaga Budaya dan Alam dalam Harmoni Komunitas Mentawai | **HAL 21**

Hutan Tampaum: Jantung Ekologi dan Sumber Kehidupan Masyarakat Bambang | **HAL 20**

Travelogue
Hal 5

Desa Manuk Bungkul: Potensi dari Kalimantan | **HAL 26**

Menemukan Hidup di Kaki Gunung Slamet | **HAL 29**

Travelogue to Mentawai Island | **HAL 32**

Photo Essay | Hal 6

Pare Huma di Tengah Tekanan Pertanian Modern

Reviews | Hal 23

Trivia | Hal 34

Opini | Hal 10

Menata Ulang Peran Hutan Rakyat dalam Pembangunan Berkelanjutan Indonesia

Indonesia memiliki hutan yang luas, namun hutan rakyat kerap tersisih di tengah ekspansi sawit, lemahnya akses modal, dan kebijakan yang bias skala besar. Sampai kapan hutan masyarakat ini terus menanggung beban pembangunan berkelanjutan?

Hutan Wakaf Sebagai Alternatif Pengelolaan Sumber Daya Berkeadilan dan Lestari

Oleh: Widhyanto Muttaqien, Wakil Ketua Bidang Politik Sumberdaya Alam LHKP PP Muhammadiyah

Selama beberapa dekade, narasi dominan yang sering diperkuat oleh ilmuwan dan aktivis yang *well-intentioned* menyatakan bahwa umat manusia secara kolektif, sebagai satu spesies yang homogen, adalah penyebab pemanasan global dan kepunahan massal. Era ini, kata mereka, adalah Antroposen, Zaman Manusia.

Narasi ini nyaman bagi para eksekutif perusahaan minyak, bankir, dan politisi yang kekuasaannya bergantung pada *status quo*. Dengan menyebarkan kesalahan secara merata ke seluruh umat manusia, dari CEO perusahaan bahan bakar fosil hingga petani subsisten di Afrika, Australia, Brazil, Bangladesh, Papua, sebagian Sulawesi, Kalimantan, dan pulau lainnya di Indonesia. Narasi ini mengaburkan akar penyebab sebenarnya: kapitalisme.

Sejarawan Jason W. Moore menyebutnya *Capitalosen*, krisis yang bukan berasal dari kemanusiaan yang abstrak, melainkan dari sistem ekonomi tertentu yang telah mengorganisasi alam dan manusia demi akumulasi keuntungan tanpa henti selama 500 tahun terakhir.

Dalam kerangka etika Islam, prinsip *hifdh al-nafs* atau perlindungan jiwa raga merupakan salah satu tujuan utama dari *maqashid al-shariah*, yaitu menjaga kehidupan manusia dari segala bentuk ancaman, kekerasan, dan eksploitasi. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan aman, sehat, dan bermartabat. Sejalan dengan itu, konsep *muhtaram* menyatakan bahwa semua makhluk adalah mulia dan memiliki nilai yang harus dihormati, baik manusia maupun alam. Dalam kerangka etika Islam, prinsip *hifdh al-nafs* atau perlindungan jiwa raga merupakan salah satu tujuan utama dari *maqashid al-shariah*, yaitu menjaga kehidupan manusia dari segala bentuk ancaman, kekerasan, dan eksploitasi. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan aman, sehat, dan bermartabat. Sejalan dengan itu, konsep *muhtaram* menyatakan bahwa semua makhluk adalah mulia dan memiliki nilai yang harus dihormati, baik manusia maupun alam. Oleh karena itu, tindakan yang merusak kehidupan, mencemari lingkungan, atau mengeksploitasi makhluk hidup secara tidak adil bertentangan dengan nilai-nilai dasar ini. Mengintegrasikan kedua prinsip ini dalam praktik sosial dan ekologis berarti membangun sistem yang berorientasi pada keadilan, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap seluruh ciptaan.

Moore dan filsuf seperti Kohei Saito berargumen bahwa kapitalisme tidak hanya mempengaruhi lingkungan, kapitalisme adalah cara mengorganisasi alam. Sistem ini bergantung pada apa yang disebut sebagai metabolisme antara masyarakat dan alam, proses di mana kita mengambil, mengubah, dan mengembalikan sumber daya. Kapitalisme, telah merobek metabolisme ini.

Dalam Q.S. Al-A'raaf : 58, Allah menggambarkan tanah yang baik sebagai tempat tumbuh tanaman yang bermanfaat, sementara tanah yang buruk hanya menghasilkan sedikit manfaat. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang kesuburan fisik, tetapi juga mengandung makna sosial dan ekologis yang mendalam.

Tanah sebagai sumber nafkah dan sumber daya bersama memiliki potensi untuk menjadi ruang pertanian yang produktif dan berkelanjutan, jika dikelola dengan nilai-nilai keadilan dan keberkahan. Dalam konteks ini, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan amanah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama, menjadi medium tumbuhnya kehidupan, pangan, dan kesejahteraan umat.

Dalam bidang sains dan teknologi, pengelolaan tanah memerlukan pemajuan pengetahuan yang bersifat interdisipliner dan kontekstual. Salah satu pendekatan yang relevan adalah agroekologi, yaitu ilmu dan praktik yang mengintegrasikan prinsip ekologi dalam sistem pertanian. Agroekologi tidak hanya berfokus pada produktivitas, tetapi juga pada keberlanjutan, keadilan sosial, dan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Dalam kerangka ini, istilah tanah buruk seperti yang disebut dalam Q.S. Al-A'raaf :58 bukan sekadar merujuk pada kesuburan fisik, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial-ekologis yang rusak akibat praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan bahan kimia berlebihan, deforestasi, atau pemisahan manusia dari tanahnya.

Agroekologi menawarkan solusi dengan mendorong regenerasi tanah melalui teknik seperti rotasi tanaman, kompos alami, konservasi air, dan keterlibatan komunitas lokal dalam pengelolaan lahan. Pengetahuan lokal juga penting untuk diarsipkan dalam bentuk pertanian berkelanjutan, arsip yang bukan ada di jurnal, namun sebagai pengetahuan yang dipraktikan turun temurun.

Hutan Wakaf sebagai Titik Terang

Dalam hukum Islam, wakaf adalah aset yang disumbangkan secara permanen untuk kepentingan umum, biasanya sebidang tanah, yang hasilnya tidak boleh dialihkan untuk keuntungan pribadi. Ia dikelola untuk komunitas, bukan untuk pemegang saham. Dalam bahasa



Hutan Wakaf Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Semarang. Jumat (22/08),
Foto: LATIN/Dicka Prawira

teori metabolisme, wakaf dapat berfungsi sebagai titik metabolik, sebuah ruang di mana hubungan antara manusia dan alam direorganisasi di luar logika kapitalis.

Hutan wakaf sebagai sumber daya milik bersama yang bersifat ilahiah sangat sejalan dengan konsep Jason W. Moore tentang *world-ecology* dan kritiknya terhadap kapitalisme sebagai sistem yang merusak hubungan manusia dengan alam. Hutan wakaf menawarkan model alternatif yang menolak logika kepemilikan privat dan akumulasi, serta mengembalikan alam sebagai bagian dari kehidupan sosial dan spiritual umat. Sebagai milik bersama *(commons)* yang diikat oleh nilai-nilai ilahiah, hutan wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ruang ekologis, tetapi juga sebagai ruang sosial dan spiritual. Ia menjadi medium rekoneksi antara manusia dan alam, di mana kerja manusia (seperti konservasi, budidaya, dan pendidikan lingkungan) dilakukan bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk kemaslahatan kolektif.

Lebih jauh, hutan wakaf dapat menjadi titik metabolik yang menyembuhkan keretakan antara manusia dan alam. Dengan pengelolaan berbasis komunitas, nilai spiritual, dan prinsip keberlanjutan, hutan wakaf menciptakan sistem produksi yang tidak merusak, melainkan merawat kehidupan. Dalam konteks ini, Moore dan konsep wakaf bertemu dalam visi yang sama: membangun dunia di mana alam bukan objek eksploitasi, tetapi mitra dalam kehidupan bersama.

Bayangkan sebidang tanah wakaf. Ia tidak dapat dijual atau digadaikan. Tujuannya bukanlah menghasilkan laba finansial, tetapi menghasilkan nilai sosial dan ekologis, pertanian regeneratif, konservasi hutan, energi terbarukan, atau pendidikan. Di sini, kerja bukanlah sekadar upah buruh, tetapi—seperti yang ditunjukkan Moore—sebuah relasi ekologis yang menyatukan kembali manusia dengan tanahnya.

Wakaf, dalam bentuk idealnya, menolak prinsip fundamental kapitalisme, bahwa segala sesuatu, termasuk alam, harus menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan. Ia mengingatkan kita bahwa tanah dapat menjadi sebuah hubungan, sebuah amanah, dan sebuah warisan, bukan sekadar aset finansial.

Wakaf memiliki landasan hukum dan etis, yang mengembalikan otoritas dan martabat lewat pengelola/nazir kepada penerima manfaat komunitas (kelompok tani, di Muhammadiyah disebut Jaringan Tani Muhammadiyah) sebagai penjaga pengetahuan ekologis yang telah teruji waktu. Pengakuan ini kemudian harus diterjemahkan ke dalam kemitraan kelola yang setara, disinilah mata pencaharian berkelanjutan akan bertumbuh, bukan sebagai proyek bantuan jangka pendek, melainkan sebagai hasil alami dari sebuah sistem yang menghargai keseimbangan ekologis, memastikan bahwa kesejahteraan ekonomi komunitas berjalan selaras dengan regenerasi alam, sehingga menciptakan sebuah lingkaran nilai yang memulihkan hubungan metabolisme antara manusia dan bumi.

Tentu saja, wakaf menjadi kotak pandora, bukan panacea. Institusi ini memiliki sejarahnya sendiri yang kompleks dan tantangan modern dalam pengelolaannya. Namun, prinsip-prinsipnya seperti pengelolaan bersama, keberlanjutan, dan pengabaian terhadap akumulasi kapital membuat wakaf menawarkan cetak biru yang radikal. Kita membutuhkan lebih banyak titik metabolik seperti wakaf, ruang di mana kita dapat mempraktikkan cara hidup yang berbeda, yang didasarkan pada pemulihan, bukan ekstraksi pada komunitas dan komoditas.

Oleh:
Widhyanto Muttaqien
Wakil Ketua Bidang Politik
Sumberdaya Alam LHKP PP
Muhammadiyah





Pare Huma di Tengah Tekanan Pertanian Modern

Sistem pertanian ladang kering ini masih dijalankan masyarakat adat Sindangbarang sebagai cara menjaga pangan, tradisi, dan keseimbangan ekosistem di tengah perubahan zaman.

Padi ladang atau dikenal juga sebagai *pare huma* masih ditanam di Kampung Budaya Sindangbarang, Kabupaten Bogor. Berbeda dengan padi sawah, *pare huma* tumbuh di *huma*, lahan kering tanpa irigasi, dan bergantung sepenuhnya pada hujan serta pengetahuan pertanian adat.

Proses *ngahuma* dilakukan secara manual. Lahan dibuka tanpa alat berat dan tanpa pupuk kimia. Penanaman benih atau *ngaseuk* mengikuti penanggalan adat dan aturan yang membatasi pengolahan tanah. Cara ini menjaga kesuburan lahan sekaligus mencegah pembukaan hutan secara berlebihan.

Bagi warga Sindangbarang, *pare huma* tidak diperlakukan sebagai komoditas. Penanaman hingga panen dikerjakan secara gotong royong. Sebagian hasil panen disimpan sebagai *pare indung* di *leuit*, lumbung padi tradisional, untuk kebutuhan ritual dan cadangan pangan keluarga.

Di tengah ekspansi pertanian modern yang mengandalkan irigasi intensif dan input kimia, praktik *pare huma* di Sindangbarang bertahan sebagai sistem pangan berbasis kearifan lokal. Sistem ini menekankan kehati-hatian dalam mengelola lahan dan menjaga hubungan antara manusia dan lingkungan.







Foto-foto dalam esai ini merekam praktik pertanian adat yang kian menyempit ruangnya, sekaligus menunjukkan bagaimana masyarakat Kampung Budaya Sindangbarang mempertahankan pare huma sebagai bagian dari identitas budaya dan strategi bertahan hidup.

Foto: Ahadian Rizqi Setiaji, Iqbal Ishlahiddin

Narasi: Annisa Aliviani

Menata Ulang Peran Hutan Rakyat dalam Pembangunan Berkelanjutan Indonesia

Hutan adalah aset ekologis, ekonomi, dan sosial yang tak ternilai bagi Indonesia. Bahkan, negara ini sering disebut sebagai paru-paru dunia karena luasnya mencapai 95,5 juta hektare, atau 51,1% dari total daratan (KLKH, 2024). Dari angka tersebut, sekitar 91,9% (87,8 juta hektare) berada di dalam kawasan hutan. Meskipun luas, hutan-hutan tersebut menghadapi tekanan luar biasa, mulai dari deforestasi, degradasi, hingga konflik kepemilikan lahan. Di tengah sorotan publik yang lebih sering diarahkan pada hutan negara atau konsesi perusahaan besar, terdapat satu fenomena penting yang kerap luput dari perhatian, yakni hutan rakyat. Menurut (Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 2013), Hutan rakyat adalah hutan di tanah milik individu atau kelompok dengan luas minimal 0,25 ha dan penutupan tajuk >50%. Selain menjadi sumber kayu alternatif, hutan rakyat juga berperan menyerap karbon, menjaga tata air, dan mendukung ekonomi petani kecil.

Potensi besar ini belum tergarap optimal karena berbagai permasalahan struktural. Salah satu masalah utama adalah alih fungsi lahan. Menurut sebuah studi oleh Kartodihardjo dan Supriono (2000), kebijakan pemerintah yang mendorong konversi hutan menjadi lahan perkebunan, termasuk kelapa sawit, sering kali didorong oleh insentif ekonomi dan kebutuhan investasi.

Dilema utama dalam alih fungsi hutan rakyat menjadi kebun sawit terletak pada pertentangan antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan ekologi jangka panjang. Dari sisi ekonomi, sawit dianggap lebih menguntungkan karena dapat memberikan pendapatan yang cepat dan stabil dibandingkan tanaman kayu yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dipanen. Namun, dari sisi ekologi, konversi hutan rakyat ke perkebunan sawit monokultur menyebabkan hilangnya keanekaragaman vegetasi, menurunnya fungsi ekologis. Sehingga, masyarakat pemilik lahan dihadapkan pada pilihan sulit untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih cepat melalui sawit, tetapi harus mengorbankan keberlanjutan fungsi ekologis hutan rakyat,



Foto: LATIN/Taufik Saifulloh

atau mempertahankan hutan rakyat untuk keberlangsungan kelestarian lingkungan tetapi memberikan hasil ekonomi yang relatif lambat dan tidak menentu.

Masalah lain yang tak kalah penting dalam pengelolaan hutan rakyat adalah keterbatasan modal dan akses teknologi (Pasaribu & Dewi 2025). Petani masih mengandalkan cara tradisional, menanam dengan bibit seadanya, tanpa perencanaan silvikultur yang matang. Kondisi ini semakin rumit karena panjangnya rantai distribusi. Tengkulak sering menjadi satu-satunya jalan bagi petani untuk menjual kayunya, sehingga posisi tawar mereka sangat lemah. Akhirnya, hutan rakyat tidak dilihat sebagai aset produktif jangka panjang, melainkan hanya sebagai "tabungan darurat" yang bisa ditebang sewaktu-waktu. Ironisnya, nilai tambah justru lebih banyak dinikmati oleh tengkulak atau perusahaan pengolah kayu, sementara masyarakat pemilik lahan tetap berkutat dalam lingkaran kemiskinan meski memiliki sumber daya besar. Situasi ini diperparah dengan minimnya pengetahuan tentang silvikultur berkelanjutan, ditambah kurangnya pendampingan nyata dari pemerintah maupun lembaga pendidikan. Akibatnya, hutan rakyat berjalan tanpa arah yang jelas, sekadar bertahan, tanpa mampu menjadi penopang kesejahteraan yang sebenarnya.

Permasalahan lain yang dihadapi hutan rakyat di Indonesia adalah masih terbatasnya diversifikasi tanaman. Menurut Sari et al. (2018), petani cenderung menanam jenis pohon tertentu, seperti sengon, jati, atau mahoni, tanpa mengkombinasikannya dengan tanaman lain. Pola monokultur ini membuat hutan rakyat rentan terhadap serangan hama, penyakit, serta gejolak harga kayu di pasar. Ketergantungan penuh pada komoditas kayu juga memperburuk kondisi ekonomi petani. Ketika harga kayu turun, pendapatan mereka langsung merosot karena tidak memiliki sumber alternatif lain dari hasil hutan, misalnya madu, tanaman obat, buah hutan, atau sistem agroforestri yang lebih beragam. Akibatnya, keberlanjutan ekonomi masyarakat pemilik hutan rakyat menjadi rapuh, meskipun potensi hasil hutan non-kayu sebenarnya sangat besar untuk dikembangkan.

Permasalahan berikutnya adalah minimnya dukungan kebijakan dan pendampingan yang berkesinambungan. Program pemerintah seringkali hanya berhenti pada tahap bantuan awal, tanpa ada tindak lanjut yang konsisten serta kurang melibatkan masyarakat secara penuh dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan. Kondisi ini membuat banyak hutan rakyat tidak terkelola secara optimal, karena petani dibiarkan kembali mengandalkan cara tradisional tanpa dukungan teknis, kelembagaan, maupun akses pasar yang memadai. Akibatnya, potensi besar hutan rakyat untuk menopang ekonomi masyarakat sekaligus menjaga fungsi ekologis belum dapat diwujudkan secara maksimal.

Ancaman perubahan iklim juga menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan hutan rakyat di Indonesia. Perubahan pola cuaca yang semakin ekstrim seperti kekeringan berkepanjangan maupun banjir, berdampak langsung pada produktivitas tanaman hutan. Kondisi iklim yang tidak menentu membuat pohon lebih rentan terserang hama dan penyakit, sehingga kualitas dan kuantitas hasil kayu menurun. Di sisi lain, sebagian besar petani hutan rakyat belum memiliki kapasitas adaptasi yang memadai, baik dalam pengetahuan teknis, akses teknologi, maupun dukungan kelembagaan. Akibatnya, perubahan iklim berpotensi memperburuk kerentanan ekonomi petani sekaligus mengancam fungsi ekologis hutan rakyat secara keseluruhan.

Permasalahan di atas menunjukkan bahwa hutan rakyat di Indonesia pada umumnya, masih terpinggirkan dalam pembangunan kehutanan. Padahal, hutan rakyat bisa menjadi instrumen penting dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-13 (penanganan perubahan iklim) dan ke-15 (melindungi ekosistem darat). Jika dikelola dengan baik, hutan rakyat dapat menyerap karbon, meningkatkan pendapatan petani, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan. Pemerintah telah memiliki kebijakan kehutanan di Indonesia, namun implementasinya masih cenderung memprioritaskan investasi skala besar dibandingkan penguatan hutan rakyat.

Perusahaan besar dengan konsesi ratusan ribu hektare sering mendapatkan kemudahan izin, sementara petani kecil kesulitan memperoleh legalitas lahan hutan rakyatnya. Selain itu, program-program pemerintah kerap bersifat proyek jangka pendek, bukan pendampingan berkelanjutan. Misalnya, distribusi bibit gratis tanpa disertai pelatihan teknis dan akses pasar hanya membuat masyarakat menanam, tetapi tidak mampu mengelola hasil dengan baik. Kritik lainnya adalah minimnya integrasi antara kebijakan kehutanan dengan sektor pertanian, perkebunan, dan tata ruang wilayah, sehingga hutan rakyat tidak mendapat posisi yang jelas dalam rencana pembangunan daerah.

Untuk memperkuat peran hutan rakyat di Indonesia, beberapa gagasan dapat ditawarkan sebagai solusi konkret. Salah satunya adalah dengan memperkuat skema agroforestri. Melalui sistem ini, pohon kayu ditanam bersamaan dengan tanaman pertanian jangka pendek seperti kopi, kakao, jahe, porang, atau berbagai jenis buah-buahan. Pola tanam kombinasi semacam ini tidak hanya menjaga tutupan lahan dan fungsi ekologis hutan, tetapi juga mampu memberikan sumber pendapatan rutin bagi petani dari hasil tanaman sela. Dengan adanya pemasukan yang lebih cepat dan berkesinambungan, petani tidak lagi tergoda untuk mengalihfungsikan lahan mereka ke komoditas lain seperti sawit. Sebaliknya, hutan rakyat justru dapat bertransformasi menjadi sumber ekonomi yang menguntungkan sekaligus sarana menjaga kelestarian lingkungan.

Kemudian, menyediakan dukungan pembiayaan yang ramah lingkungan. Pemerintah bersama lembaga keuangan dapat menghadirkan skema kredit khusus dengan bunga rendah, seperti kredit hijau atau pembiayaan mikro berbasis lingkungan, sehingga petani memiliki modal untuk mengelola lahan secara lebih produktif. Selain itu, penguatan kelembagaan petani melalui koperasi atau kelompok tani hutan juga



Ilustrasi Foto: LATIN/Taufik Saifulloh

penting dilakukan agar mereka dapat mengakses modal bersama, membeli sarana produksi secara kolektif, sekaligus memperkuat posisi tawar terhadap tengkulak. Upaya ini perlu dilengkapi dengan transfer teknologi dari lembaga penelitian, perguruan tinggi, maupun pemerintah melalui pelatihan dan pendampingan terkait silvikultur modern, pemilihan bibit unggul, serta teknik pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dengan kombinasi dukungan finansial, kelembagaan yang kuat, dan akses teknologi, hutan rakyat berpotensi dikelola secara lebih efisien sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Hutan rakyat adalah cermin bagaimana masyarakat kecil berkontribusi pada pelestarian hutan sekaligus berjuang untuk bertahan hidup. Namun, tanpa dukungan kebijakan yang memadai, hutan rakyat sulit berkembang optimal. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menata ulang strategi pengelolaan hutan rakyat. Dengan memperkuat kelembagaan, memberikan akses modal, memberikan insentif lingkungan, serta membuka peluang diversifikasi produk, hutan rakyat dapat menjadi benteng pertahanan ekologis sekaligus motor ekonomi masyarakat. Jika langkah ini sungguh-sungguh dilakukan, hutan rakyat tidak hanya menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang, tetapi juga menjadi bukti bahwa pembangunan berkelanjutan bisa dimulai dari desa-desa kecil hingga ke seluruh Indonesia.



Tentang Penulis

Ismawati adalah mahasiswa Magister Sains Agribisnis di IPB yang aktif dalam kegiatan sosial, baik sebagai relawan maupun melalui aktivitas kampus. Selain itu, Ismawati juga memiliki minat dalam bidang penelitian perilaku konsumen dan pemasaran serta telah menulis beberapa artikel ilmiah terkait agribisnis serta isu keberlanjutan.

REFERENSI

Kartodihardjo, H., & Supriono, A. *The Impact of Sectoral Development on Natural Forest Conversion and Degradation*: *The Case of Timber and Tree Crop Plantations in Indonesia.* Occasional Paper No. 26, Centre for International Forestry Research (CIFOR), 2000.

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang hutan rakyat.* Jakarta: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. *Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024*. Siaran Pers, 20 Mar. 2025, kehutanan.go.id/news/article-10.

Pasaribu, L. M., & Dewi, N. L. P. K. (2025). *Pengaruh tata kelola kelembagaan dan usaha terhadap efektivitas pengelolaan hutan melalui kinerja KTH di perhutanan sosial Glagalinggah, Kintamani, Bali*. Journal Science Innovation and Technology (SINTECH), 5(2), 63–72.

Sari, R. R., Hairiah, K., & Suyanto, S. (2018). *Karakteristik hutan rakyat jati dan sengon serta manfaat ekonominya di Kabupaten Malang*. Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 2(2), 129–137.

Jejak Hijau di Lubuk Alung: Menumbuhkan Asa di Tanah Bekas Pembalakan

Udara sejuk pagi hari menyapa lembut di Ekowisata Nyarai, Nagari Salibutan, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Suara gemericik air terjun berpadu dengan kicau burung, menciptakan harmoni alami yang menenangkan. Hutan yang berada di ambang kehancuran kini kembali hidup, memeluk lembah dengan rindang.

Siapa sangka, kawasan yang kini banyak dikunjungi wisatawan ini dulunya adalah lokasi pembalakan liar. Bagi warga, menebang kayu bukan sekadar pekerjaan—itu adalah cara bertahan hidup turun-temurun. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul kekhawatiran baru. Jika hutan pupus, maka mata air mengering, dan kehidupan pelan-pelan kehilangan keseimbangannya.





Dari Keresahan Lahir Kepedulian

Perubahan besar itu dimulai dari kepulangan seorang putra daerah: **Ritno Kurniawan**, alumni Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Saat pulang ke kampung halamannya, ia melihat dua kenyataan yang bertolak belakang: alam yang indah namun terabaikan, dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada penebangan hutan.

Kenyataan itu lantas memunculkan pemikiran bahwa semestinya menggantungkan hidup pada hutan tak lantas menjadikan hutan itu pupus. Dari kesadaran sederhana itu, lahirlah tekad untuk mengubah arah: Bagaimana hutan bisa tetap lestari, tapi masyarakat juga tetap sejahtera?

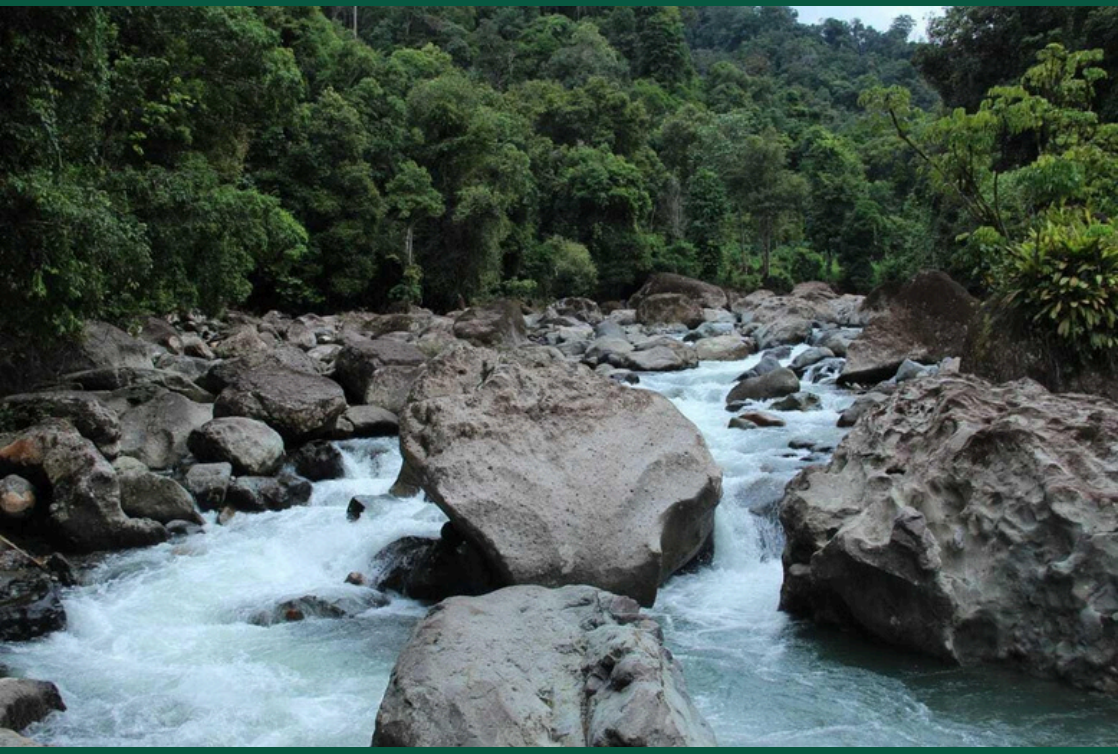
Bersama beberapa rekannya, Ritno mulai menjelajahi hutan-hutan di sekitar Lubuk Alung, hingga menemukan air terjun di lokasi tersembunyi dengan pemandangan menawan. Namun upaya membuka kawasan ini sebagai wisata alam tak mudah. Masyarakat awalnya menolak keras karena takut kehilangan sumber penghidupan sebagai penebang kayu.

Foto: Desa Wisata Nyarai

Menembus Rasa Takut dan Tradisi

Hampir sebagian besar warga Lubuk Alung saat itu bekerja sebagai penebang kayu. Hal tersebut turut diperkuat dalam riset berjudul "Peran Community Based Tourism dalam Pengelolaan Ekowisata Nyarai, di Nagari Salibutan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat" yang dilakukan Fitra dkk. pada tahun 2025. Maka, ketika ide wisata muncul, masyarakat menganggapnya sebagai ancaman baru.

Alih-alih memaksakan perubahan, Ritno memilih jalan pendekatan sosial. Ia berdialog dengan beberapa tokoh adat yang disegani seperti Datuk dan kapalo mudo. Ia mengemukakan gagasan bahwa wisata bisa memberi penghasilan tanpa harus menebang hutan. Bersama kawan-kawannya, ia bahkan bersedia melatih masyarakat menjadi pemandu wisata, agar transisi terasa mungkin. Pelan-pelan, pintu kepercayaan terbuka. Beberapa warga muda mencoba untuk ikut belajar menjadi pemandu wisata. Di awal inisiasi, kendala terbesar yang mereka hadapi adalah keterbatasan modal. Namun semangat itu tak padam. Mereka membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang diberi nama L.A. Adventure pada tahun 2013 sebagai wadah resmi gerakan tersebut.



Lubuak Sikayan Limau, salah satu lubuk di Kawasan Ekowisata Nyarai yang menjadi spot paling diminati oleh pemancing. (Foto: Desa Wisata Nyarai)

Dari Gergaji ke Dayung: Lahirnya Lestari Alam *Rafting*

Melihat potensi Sungai Batang Anai yang mengalir deras dengan dihiasi pemandangan alam yang memukau, L.A. Adventure berinovasi dengan membangun wisata arung jeram. Maka lahirlah Lestari Alam Rafting, yang kemudian bernaung di bawah CV Lubuk Alung Adventure. Badan usaha ini dibentuk tahun 2017 dan mendapatkan legalitas operasional pada awal 2018.

Kegiatan wisata ini tak hanya menawarkan keseruan arung jeram, tetapi juga *trekking*, *camping*, dan *outbound,* dengan warga lokal sebagai penggerak utama. Dukungan pun mulai datang dari Dinas Pariwisata setempat. Keuntungan usaha diputar kembali ke masyarakat dengan harapan dapat mendongkrak kesejahteraan warga sekitar.

Semenjak adanya aktivitas wisata, perlahan semakin banyak warga yang bertransisi menjadi pemandu wisata dan meninggalkan pekerjaan sebagai penebang kayu. Warga mulai merasakan manfaatnya secara ekonomi. Aktivitas wisata membuat masyarakat melihat hutan bukan lagi sebagai sumber kayu semata, namun sumber kehidupan yang harus dijaga.

Membangun Pariwisata Berbasis Masyarakat

Dalam perjalanannya, Ritno mengembangkan prinsip *Community Based Tourism* (CBT) sebagai dasar pengelolaan Ekowisata Nyarai dan Lestari Alam Rafting. *Community Based Tourism* atau Pariwisata Berbasis Masyarakat menekankan keberlanjutan budaya, sosial, dan lingkungan. Bentuk wisata ini dikelola dan dimiliki oleh masyarakat untuk masyarakat.

Di Nagari Salibutan, pendekatan ini memiliki tujuan yang sangat nyata: mensejahterakan masyarakat tanpa mengorbankan hutan. Jika dulu warga hanya mengenal Hutan Gamaran sebagai sumber kayu, kini mereka melihatnya sebagai sumber kehidupan yang lebih luas — ruang wisata yang menciptakan peluang kerja, membuka lapangan ekonomi baru, dan memupuk kebanggaan terhadap nagari sendiri.



Kunjungan tim Dompet Dhuafa ke lokasi Lestari Alam Rafting. (Foto: Khansa Naura Mufidah)

Lebih dari sekadar konsep, CBT di sini adalah bukti bahwa ketika warga diberi ruang untuk berdaya, hutan tak lagi menjadi korban, melainkan sahabat yang dijaga bersama.

Dari Gergaji ke Dayung: Lahirnya Lestari Alam *Rafting*

Tahun 2023 menjadi tonggak baru. Pengembangan Kawasan Wisata Lestari Alam Rafting menjadi salah satu portofolio terpilih dalam Program LINE Forum *(Local Leader in Empowerment)* yang digagas oleh Dompet Dhuafa bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. LINE Forum sendiri merupakan salah satu langkah Dompet Dhuafa untuk menjaring portofolio pemberdayaan yang digerakkan oleh orang muda di Indonesia yang potensial untuk dikembangkan. Melalui program ini, Dompet Dhuafa memberikan dukungan berupa pembangunan *Glamping* Lestari Alam. Intervensi ini ditujukan sebagai solusi atas keterbatasan penginapan di Kawasan Wisata Lestari Alam.

Kini, dukungan pendanaan dan pendampingan kelembagaan dikelola oleh Yayasan Wirausaha Indonesia Berdaya (YWIB), yang berperan sebagai perpanjangan tangan Dompet Dhuafa dalam bidang pemberdayaan ekonomi. Bentuk dukungan pendanaan tersebut diwujudkan dalam bentuk pembelian perlengkapan glamping, pembangunan toilet dan mushola, pemasangan instalasi listrik, serta sarana pendukung lainnya. Dukungan ini turut-

memperkuat rantai keberlanjutan Lestari Alam: Wisata tumbuh, ekonomi berputar, dan warga makin berdaya.

Pengakuan Nasional: Sertifikasi CHSE dan Penghargaan

Pada tahun 2022, Ekowisata Nyarai berhasil meraih sertifikasi CHSE *(Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability)* dari Badan Sertifikasi Nasional. Sertifikasi ini menandai bahwa kawasan tersebut telah memenuhi standar nasional dalam hal kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan.

Bagi Ritno dan tim, CHSE bukan sekadar sertifikat, tapi simbol komitmen. Komitmen untuk memastikan wisata alam ini tidak hanya indah, tapi juga aman, sehat, dan berkelanjutan. Harapannya, melalui sertifikasi ini, Ekowisata Nyarai kian dikenal sebagai model ekowisata rakyat yang ramah lingkungan dan inklusif, menjembatani antara kepedulian ekologis dan kesejahteraan sosial.

Selain sertifikasi CHSE, Ekowisata Nyarai juga telah menyabet beberapa penghargaan diantaranya Juara II Pokdarwis Tingkat Nasional Tahun 2014, Juara 1 Kompetensi Penyelamatan Lingkungan dari EOCA *(European Outdoor Conservation Association)* pada tahun 2015, Satya Lencana Kepariwisataan tahun 2019, dan beberapa lainnya. Rangkaian prestasi tersebut bukan sekadar simbol keberhasilan, melainkan penanda perjalanan panjang perubahan pola pikir masyarakat—dari yang dahulu menebang demi bertahan hidup, kini menjaga demi keberlanjutan.

Membangun dari Akar: Hutan untuk Warga

Kini, Ekowisata Nyarai dan Kawasan Wisata Lestari Alam telah berubah menjadi ruang hidup baru bagi masyarakat. Ketergantungan terhadap alam yang dulu bersifat merusak kini berbalik menjadi sikap memelihara. Wujud sikap memelihara itu juga ditampakkan melalui kegiatan Pohon Asuh. Kegiatan ini memberikan peluang bagi wisatawan untuk ikut serta menanam dan merawat pohon di kawasan hutan Gamaran.

Selain menyuguhkan keindahan air terjun dan arus sungai yang menantang, kawasan ini juga menjadi habitat beberapa flora dan fauna seperti lutung merah, burung kuau, ikan panjang, cacing kepala martil, tanaman amomum, dan buah berangan, bukti bahwa keseimbangan alam tetap terjaga.

Tak hanya disajikan kekayaan flora dan fauna, wisatawan juga disuguhkan dengan pengalaman unik seperti Spear Fishing, sensasi menangkap ikan dengan cara tradisional di sungai Batang Salibutan menggunakan panah tembak dan kacamata air buatan anak nagari Desa Wisata Nyarai. Juga Mahseer Fly Fishing, yaitu memancing ikan Mahseer dengan teknik Fly Fishing di lubuak larangan kawasan Sungai Batang Salibutan. Kedua aktivitas tersebut tentunya dilakukan dengan tetap memperhatikan kelangsungan ekosistem di Sungai Batang Salibutan.

Perubahan sosial pun nyata terasa. Bagi warga Lubuk Alung, hutan kini bukan lagi ruang yang dieksploitasi, melainkan ruang hidup yang dirawat bersama. Dari menjadi pemandu wisata, pengelola arung jeram, hingga penjaga jalur trekking dan glamping, mereka memahami bahwa keberlanjutan usaha hanya mungkin terjaga jika hutan tetap utuh. Menjaga hutan, pada akhirnya, menjadi cara mereka menjaga penghidupan dan masa depan nagari mereka sendiri.



Buah Berangan. *Foto: Desa Wisata Nyarai*



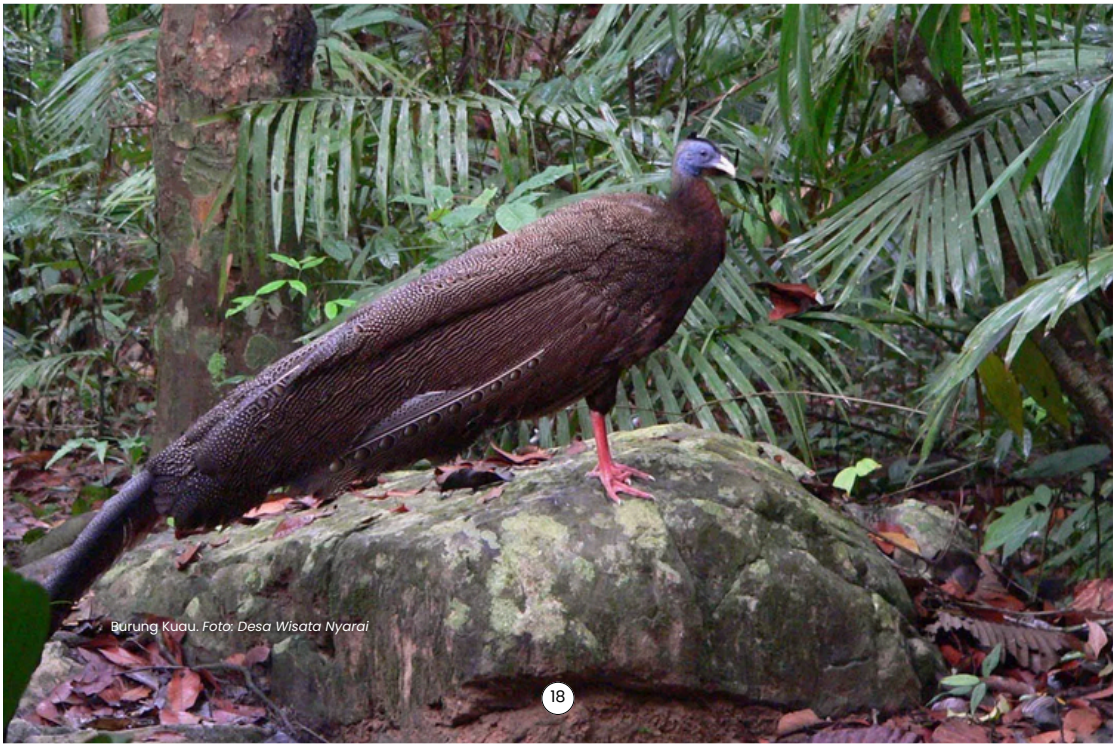
Amomum. *Foto: Desa Wisata Nyarai*



Lutung Merah. *Foto: Desa Wisata Nyarai*



Ikan Panjang. *Foto: Desa Wisata Nyarai*



Burung Kuau. *Foto: Desa Wisata Nyarai*

Refleksi: Hutan Rakyat, Hak yang Diperjuangkan

Perjalanan Ekowisata Nyarai dan Kawasan Wisata Lestari Alam adalah contoh nyata bagaimana hak warga untuk mengelola dan menjaga hutan bisa tumbuh menjadi gerakan kolektif yang kuat. Inisiatif ini memperlihatkan bahwa pelestarian hutan tak melulu bergantung pada kebijakan besar, tapi juga pada keberanian warga untuk mengambil peran.

Dalam semangat tema Forest Culture edisi ini—"Hutan Wakaf, Hutan Rakyat, Hutan Adat"—kisah Ekowisata Nyarai dan Lestari Alam menjadi pengingat bahwa hutan tidak hanya dimiliki oleh negara atau adat, tapi juga oleh nurani masyarakat yang merawatnya. Bahwa menjaga hutan bukan hanya tindakan ekologis, melainkan juga tindakan spiritual dan sosial: membangun kembali hubungan antara manusia dan alam dalam keseimbangan yang saling menghidupi.

"Jejak hijau di Lubuk Alung tidak hanya bercerita tentang hutan yang kembali bernafas, tetapi juga tentang lahirnya harapan baru, bahwa perubahan bisa tumbuh dari tangan-tangan sederhana yang mencintai tanahnya."



Tentang Penulis
Khansa Naura Mufidah berperan sebagai Institutional Development Officer di Yayasan Wirausaha Indonesia Berdaya (YWIB). YWIB merupakan mitra pelaksana Dompet Dhuafa di bidang pemberdayaan ekonomi. Saat ini YWIB sedang mengelola lebih dari 40 program ekonomi, dengan menerapkan prinsip Philantropreneurship yaitu memadukan semangat kedermawanan dan profesionalisme dalam pengembangan usaha masyarakat.

Hutan Tampaum: Jantung Ekologi dan Sumber Kehidupan Masyarakat Bambang

Hutan Tampaum terletak di Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Hutan ini dikenal sebagai jantung alam Kecamatan Bambang karena perannya yang sangat vital dalam menjaga kestabilan ekologi dan ekosistem di wilayah tersebut. Didukung oleh vegetasi yang masih relatif alami, Hutan Tampaum menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, termasuk beberapa satwa endemik Sulawesi yang kini mulai langka. Selain nilai ekologisnya, Hutan Tampaum juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat sekitar. Sumber air yang mengalir dari kawasan hutan ini menjadi penopang utama kegiatan pertanian warga, terutama dalam mengairi sawah dan kebun. Oleh karena itu, keberadaan Hutan Tampaum bukan hanya menjaga keseimbangan alam, tetapi juga menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat Bambang yang bergantung pada sumber daya alamnya.

Bagi masyarakat sekitar, Hutan Tampaum bukan sekadar kawasan hijau, tetapi juga ruang hidup yang sarat makna budaya dan spiritual. Banyak tradisi lokal yang mengajarkan pentingnya menghormati dan menjaga hutan sebagai warisan leluhur. Prinsip ini sejalan dengan semangat hutan rakyat dan hutan adat, di mana masyarakat menjadi bagian langsung dari pengelolaan dan pelestarian hutan. Melalui pengakuan dan pengelolaan berbasis masyarakat, Hutan Tampaum dapat menjadi contoh nyata bagaimana keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam dapat diwujudkan. Menjaga Hutan Tampaum berarti menjaga denyut kehidupan masyarakat Bambang dan masa depan ekologi Mamasa.



Tentang Penulis

Irsan adalah penulis asal Bambang, Mamasa, Sulawesi Barat, yang menulis tentang Hutan Tampaum sebagai wujud keterikatan masyarakat lokal dengan alam serta peran mereka dalam menjaga kelestarian hutan rakyat dan adat.



Sikerei

Penjaga Budaya dan Alam dalam Harmoni Komunitas Mentawai



Penulis/Foto:
Nada Rahma Yanti
adalah pelaku kreatif yang aktif menyuarakan budaya Mentawai melalui kerja komunitas dan usaha berbasis kearifan lokal.

Di tengah hutan pulau Mentawai yang kaya akan keanekaragaman hayati, hidup sebuah komunitas adat dengan tradisi yang sangat erat kaitannya dengan alam, yaitu para Sikerei. Sikerei bukan sekadar tokoh adat biasa, melainkan penjaga spiritual dan pelestari budaya yang menjaga keseimbangan antara manusia, tumbuhan, dan lingkungan sekitar. Budaya Sikerei adalah contoh nyata bagaimana komunitas dapat berinovasi dalam menjaga alam sambil mempertahankan identitas budaya yang kuat. Sikerei berasal dari kata 'Sikerai' yang berarti "penyembuh" atau "orang yang memiliki kekuatan spiritual". Mereka dipercaya sebagai mediator antara dunia manusia dan roh alam. Dalam komunitas Mentawai, Sikerei memegang peranan penting dalam ritual adat, penyembuhan, dan pengatur tata kelola lingkungan hidup.

Mereka menggunakan pengetahuan tradisional turun-temurun untuk melindungi hutan, menjaga iklim mikro, serta memastikan bahwa alam tetap seimbang dan berkelanjutan.

Para Sikerei biasa melakukan ritual yang melibatkan simbol-simbol alam seperti daun-daun hijau, tanah, dan api. Ritual ini bukan hanya soal adat, tapi juga merupakan inovasi budaya yang efektif membawa pesan penting tentang konservasi dan penghormatan pada alam. Mereka mengajarkan bahwa pohon dan tumbuhan tidak hanya sumber kehidupan secara fisik, tapi juga spiritual, sehingga harus dijaga dengan penuh rasa hormat.

Walau berakar kuat pada adat, Sikerei tak menutup diri terhadap perubahan zaman. Mereka kerap menggabungkan pengetahuan tradisional dengan ilmu pengetahuan modern dalam mengelola sumber daya alam. Misalnya, dalam menjaga hutan, Sikerei mempraktekkan pemilihan pohon yang boleh ditebang dan menanam kembali tanaman tertentu, sehingga siklus alam tetap terjaga. Metode ini menjadi inspirasi untuk model konservasi berbasis masyarakat yang kini semakin banyak diperhatikan oleh para ilmuwan dan praktisi lingkungan. Sikerei juga aktif mendukung pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan, seperti kerajinan tangan berbahan alami dan kuliner khas Mentawai. Mereka mengawasi agar pemanfaatan sumber daya alam tidak merusak lingkungan, memberikan contoh bahwa kemajuan ekonomi bisa berjalan seiring dengan pelestarian budaya dan alam.

Budaya Sikerei mengajarkan kita pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam. Dalam dunia yang kini dihadapkan pada perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, nilai nilai Sikerei menjadi sangat relevan. Mereka tidak hanya menjaga tradisi, tapi juga menjaga bumi sebagai rumah bersama.

Kisah para Sikerei adalah inspirasi bagi banyak komunitas di seluruh dunia untuk kembali menghargai alam secara mendalam. Sikerei menunjukkan bahwa inovasi tidak harus selalu teknologi tinggi, tapi bisa juga berupa kebijaksanaan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dan mampu menyeimbangkan kebutuhan manusia dan alam.

Keberadaan Sikerei adalah bukti nyata bahwa komunitas adat memiliki peran vital dalam pelestarian lingkungan dan budaya. Mereka adalah penjaga alam yang sekaligus penjaga jiwa sebuah bangsa. Melalui pengakuan dan dukungan, peran Sikerei bisa semakin diperkuat, sehingga warisan budaya dan alam Mentawai tetap lestari dan menjadi inspirasi bagi dunia.

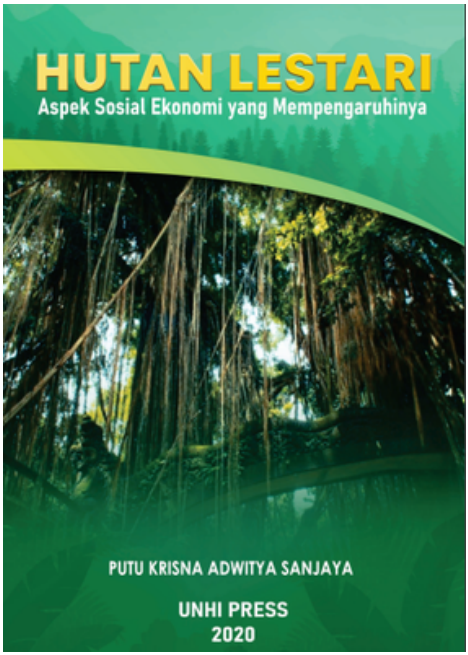


Hutan Lestari: Antara Ekonomi dan Ingatan Hijau

I. HUTAN SEBAGAI INGATAN DAN LUKA

Hutan, dalam khazanah Nusantara, bukan sekadar bentangan pohon yang berdiri tegak, melainkan sebentuk ingatan kolektif yang jauh lebih tua dari peradaban. Buku Hutan Lestari: Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya karya Putu Krisna Adwitya Sanjaya membuka pintu ke dunia yang sering kita lupakan. Hutan tak hanya paru-paru dunia, melainkan nadi kehidupan yang selama ini bekerja diam-diam. Tetapi di balik fungsinya yang vital, ia juga menyimpan luka panjang akibat kerakusan manusia. Narasi pembuka buku ini segera memberi sebuah tamparan: "Manusia tanpa hutan adalah suatu keniscayaan. Tumbuh-tumbuhan mampu hidup tanpa manusia, tetapi manusia tidak mampu hidup tanpa tumbuh-tumbuhan." Sebuah kalimat sederhana, namun tajam, yang memutar balik kesombongan peradaban modern: bahwa manusia bukanlah pusat, melainkan penumpang yang rapuh di dalam kapal kehidupan yang dikuasai oleh alam.

Dari sini buku ini berangkat: ia tidak hanya menuturkan hutan sebagai lanskap ekologis, tetapi sebagai arena tarik-menarik antara ekonomi, politik, budaya, dan spiritualitas. Dalam setiap halaman, penulis menegaskan bahwa hutan adalah cermin bagi wajah manusia sendiri: wajah yang rakus, wajah yang takut kehilangan, dan wajah yang kadang berdoa di pura atau di tepi sungai, sembari tetap menebang diam-diam di malam hari. Sejarah panjang Bali menjadi kaca pembesar yang dipilih penulis, sebuah pulau kecil yang kerap dipuja sebagai surga dunia, padahal menyimpan paradoks besar: upacara suci yang memuliakan pohon berjalan seiring dengan statistik penyusutan lahan hutan dari tahun ke tahun.



Di sinilah terletak kegetiran buku ini. Ia memperlihatkan betapa dalam tubuh masyarakat ada dua arus yang saling bertabrakan: arus yang ingin menjaga kelestarian dengan doa dan filosofi Tri Hita Karana—hubungan serasi antara manusia, alam, dan Tuhan—dan arus lain yang didorong oleh kebutuhan ekonomi, industri pariwisata, dan pembangunan, yang justru melukai harmoni itu sendiri. Hutan pun akhirnya bukan sekadar obyek biologis, melainkan arena konflik batin manusia modern: antara keinginan untuk hidup lebih baik dan kesadaran bahwa kehidupan itu sendiri bergantung pada pepohonan yang masih berdiri.

II. EKONOMI, ANGKA, DAN PARADOKS PEMBANGUNAN

Salah satu kekuatan buku ini adalah keberaniannya untuk menyingkap ironi yang tersimpan di balik angka-angka pertumbuhan ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang sering dielu-elukan pemerintah sebagai tanda keberhasilan pembangunan, justru dalam kajian ini dipertanyakan ulang. Data yang disajikan menunjukkan paradoks: semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin besar tekanan terhadap hutan. Tiap kenaikan angka statistik itu, sesungguhnya, dibayar dengan runtuhnya ekosistem. Ada sejenis darah yang menetes di balik grafik-grafik yang seakan netral dan objektif.

Penulis mengutip teori Kuznets tentang hipotesis U terbalik, yang menyatakan bahwa kerusakan lingkungan akan meningkat pada fase awal pembangunan, kemudian menurun setelah masyarakat menjadi lebih sejahtera. Tetapi realitas Bali menampilkan wajah berbeda: kerusakan itu tak kunjung menurun, bahkan terus memburuk. Sebab pembangunan di pulau itu digerakkan oleh pariwisata massal, yang rakus akan lahan, kayu, dan air. Maka pepohonan yang dahulu menjadi pelindung tanah kini berganti hotel, vila, dan kafe. Ritual Tumpek Wariga tetap dilaksanakan, upacara Wana Kertih tetap berjalan, doa tetap dipanjatkan, tetapi batang-batang pohon terus tumbang, dan hutan terus menyusut.

Di titik ini, buku Hutan Lestari terasa getir sekaligus jujur. Ia tak berhenti pada romantisisme budaya, tetapi juga memperlihatkan dimensi material: ekonomi yang memburu pertumbuhan, dan pemerintahan daerah yang dilema antara otonomi dan tanggung jawab ekologis. Di sinilah relevan sebuah kutipan dari Mencius yang disematkan penulis: "Jika kapak dan gergaji memasuki bukit dan hutan hanya pada saat yang tepat, maka kayu akan melebihi dari yang bisa digunakan." Kalimat itu sederhana, namun mengandung ironi zaman ini. Kita tidak lagi mengenal "saat yang tepat". Kapak bekerja tanpa henti, dan waktu bagi hutan untuk memulihkan diri semakin tak ada.

Namun, penulis juga tidak jatuh pada sikap pesimistis mutlak. Ia menyodorkan gagasan bahwa ekonomi dan ekologi sebetulnya tidak harus selalu berlawanan. Ada ruang kolaborasi, ada kemungkinan melahirkan paradigma baru pembangunan yang hijau. Tetapi itu hanya bisa terjadi bila manusia mau menata ulang orientasi hidupnya: dari sekadar mengejar pertumbuhan menuju keseimbangan, dari mengeksploitasi sumber daya menuju mengelolanya secara lestari. Di sini buku ini seolah menggaungkan prinsip klasik pembangunan berkelanjutan: memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengorbankan generasi esok.

III. KOSMOLOGI, JALAN KELUAR, DAN CERMIN DIRI

Yang membuat buku ini berbeda dari kajian ekologis lain adalah keberanian penulis untuk mengaitkan ekonomi dengan kosmologi. Ia tidak berhenti pada angka regresi atau tabel statistik, tetapi menggali teks-teks tua Hindu sebagai penyangga argumen. Dari Sarasamuccaya ia kutip ajaran: "Mari kita usahakan kelestarian alam. Jangan tidak sayang kepada semua makhluk hidup. Karena lestarinya alam dan makhluk hidup, menyebabkan terjadinya kita mencapai catur warga: dharma, artha, kama, moksa." Juga doa dari Yajur Veda: "Ya Tuhan, semoga damai di Langit, damai di Antariksa, damai di Bumi, damai di Air, damai di Hutan, damai pada pepohonan, damai dan hanya damai. Semoga kedamaian datang kepada kami."

Membaca bagian ini, terasa bahwa ajaran leluhur sebenarnya sudah jauh lebih maju dibanding teori pembangunan kontemporer. Sejak ratusan tahun lalu, ada kesadaran bahwa hutan adalah tubuh suci, dan bahwa kesejahteraan manusia tak bisa dipisahkan dari kesejahteraan pohon. Tetapi justru modernitas yang melupakan itu. Ironi ini membuat kita bertanya: apakah sebenarnya kita sedang maju, atau justru mundur?

Di bagian epilog, penulis menegaskan bahwa jalan keluar bukan hanya pada kebijakan negara, tetapi pada kolaborasi. Hutan tidak bisa dijaga oleh pemerintah semata. Ia membutuhkan keterlibatan masyarakat adat, akademisi, aktivis, bahkan warga desa kecil yang hidup di tepi rimba. Paradigma baru harus lahir: dari eksploitasi kayu menuju pengelolaan ekosistem, dari pembangunan yang buta menuju pembangunan yang berkesadaran. "Pengurusan hutan secara lestari memerlukan manusia yang berilmu, berteknologi, tetapi juga beriman dan bertakwa." Kalimat ini terdengar utopis, tetapi utopia selalu dibutuhkan: tanpa cita-cita tinggi, sejarah hanya akan berulang dalam lingkaran kehancuran. Maka membaca Hutan Lestari sama dengan menatap cermin. Kita melihat pohon, tetapi sesungguhnya yang terpantul adalah wajah kita sendiri: rakus, rapuh, sekaligus rindu akan harmoni. Gunawan Muhammad pernah menulis, manusia akan kehilangan dirinya bila kehilangan hutan, karena di sanalah imajinasi dan keteduhan pernah tumbuh. Buku ini menegaskan ulang gagasan itu: hutan bukan sekadar paru-paru dunia, melainkan paru-paru batin manusia. Jika ia roboh, mungkin yang pertama runtuh bukanlah ekosistem, melainkan jiwa kita sendiri.



Tentang Penulis

Hikmal lahir di Sidoarjo pada tahun 2002. Ia meraih gelar Sarjana Sastra Indonesia dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2021). Kini ia bekerja di bidang kajian strategis di Yayasan Pendidikan Al Ihsan, dengan minat riset pada hubungan internasional serta ekonomi Asia Pasifik.

Desa Manuk Bungkul: Potensi dari Kalimantan

Oleh: Titin Wahyuni

Perjalanan ini adalah kisah yang saya kenang kembali dari tahun 2019—sebuah perjalanan yang membawa saya menemukan salah satu desa yang menyimpan banyak keunikan dan kesan mendalam, yakni Desa Manuk Bungkul. Desa ini terletak di Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sekitar tujuh kilometer dari ibu kota kecamatan.

Desa Manuk Bungkul merupakan hasil pemekaran dari Desa Atap dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan. Nama desa ini memiliki makna menarik. Dalam bahasa Dayak, kata manuk berarti ayam, sedangkan bungkul berasal dari bahasa Tidung. Kata manuk dianalogikan sebagai masyarakat, sehingga secara umum Manuk Bungkul dimaknai sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang datang untuk berkebun dan mencari nafkah.



Gambar 1. Jalan menuju Desa Manuk Bungkul

Perjalanan Menuju Desa

Perjalanan menuju Desa Manuk Bungkul dapat ditempuh melalui jalur darat dan laut. Saat itu, saya dan teman-teman berangkat dari Tarakan dengan menggunakan jalur laut. Perjalanan menggunakan *speed* memakan waktu sekitar tiga hingga empat jam menuju Desa Atap, lalu dilanjutkan dengan perjalanan darat selama kurang lebih tiga puluh menit hingga tiba di Desa Manuk Bungkul.

Sepanjang perjalanan, kami disuguhi pemandangan hutan yang masih sangat asri. Karena wilayah ini tergolong baru dan belum dikelola secara optimal, sebagian besar jalan menuju desa belum beraspal. Beberapa tanjakan yang cukup terjal justru menambah kesan petualangan dan membuat perjalanan terasa lebih berkesan.

Menyusuri Desa Gambut

Setibanya di desa, saya mulai menyadari bahwa wilayah Desa Manuk Bungkul berada di kawasan hutan gambut. Air di parit-parit dan di sekitar rumah warga tampak merah kecokelatan, ciri khas air gambut. Awalnya, pemandangan ini cukup mengejutkan bagi saya dan teman-teman yang baru pertama kali melihatnya.



Gambar 2 : *Aliran air gambut di depan rumah warga*

Namun, bagi masyarakat setempat, air gambut adalah bagian dari keseharian. Air ini digunakan untuk mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Untuk keperluan memasak, masyarakat mengandalkan air hujan karena desa ini belum memiliki pasokan air bersih dari pemerintah. Menurut informasi warga, bantuan penyediaan air bersih saat itu sedang dalam proses pengerjaan oleh pemerintah daerah.

Potensi Ekonomi Desa

Ketika memasuki wilayah desa, suara burung walet terdengar ramai dan memecah keheningan. Suara itu datang dari rumah-rumah khusus yang digunakan warga untuk membudidayakan sarang burung walet. Dari kegiatan ini, masyarakat dapat meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Budidaya walet menjadi salah satu sumber penghasilan penting yang membantu meningkatkan perekonomian desa.



Gambar 3. Rumah pembudidayaan sarang burung walet

Selain itu, sebagian besar masyarakat Desa Manuk Bungkul juga bermata pencaharian sebagai petani. Beberapa kebutuhan pangan, seperti sayur-sayuran, diperoleh langsung dari hutan, di antaranya pakis dan kali janju (tunjuk langit). Warga juga menanam padi serta berbagai jenis buah seperti langsat, maritom, dan durian. Pola pemanfaatan lahan ini menunjukkan cara masyarakat mengelola lahan secara beragam dan saling berdampingan antara tanaman pangan dan tanaman berkayu.

Saat berkeliling desa, saya melihat banyak daun-daunan dijemur di depan rumah warga. Daun tersebut dikenal sebagai daun kekatun atau kratom, tanaman yang tumbuh liar di hutan Kalimantan dan memiliki nilai ekonomi cukup tinggi. Setiap pagi, warga pergi ke hutan untuk memetik daun ini. Sebelum dijual, daun kratom dijemur hingga kering, kemudian dihaluskan menggunakan mesin sederhana. Setelah melalui proses tersebut, kratom siap dijual kepada tengkulak.



Gambar 4. Daun kekatun (kratom) yang dijemur warga

Selain kratom, beberapa warga juga memanfaatkan daun pandan hutan untuk membuat kerajinan tangan seperti tas, tikar, dan dompet. Meski masih dikelola secara sederhana di rumah masing-masing, kerajinan ini menjadi bentuk kreativitas masyarakat sekaligus peluang tambahan untuk meningkatkan pendapatan. Produk kerajinan biasanya dipasarkan saat ada kegiatan daerah, seperti pameran kerajinan.



Refleksi Perjalanan

Desa Manuk Bungkul tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memperlihatkan bagaimana masyarakat hidup berdampingan dengan lingkungan sekitarnya. Mereka memanfaatkan hasil hutan sebagai sumber penghidupan tanpa merusak alam secara berlebihan, menjadikan tumbuhan liar sebagai bahan obat sekaligus sumber ekonomi. Bagi saya, perjalanan ke desa ini bukan sekadar perjalanan wisata, melainkan pengalaman yang memberi pelajaran tentang ketahanan hidup, kreativitas, dan rasa syukur. Harapannya, masyarakat Desa Manuk Bungkul dapat terus menjaga kelestarian alam agar potensi yang ada tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Dengan dukungan pemerintah dan pengelolaan yang berkelanjutan, desa ini memiliki peluang untuk berkembang sebagai contoh desa dengan ekonomi hijau di Kalimantan Utara.

Menemukan Hidup di Kaki Gunung Slamet



Ilustrasi: ChatGPT

Sejak lama, aku selalu merasa ada sesuatu yang memanggil dari arah hutan. Bukan sekadar ketertarikan pada pepohonan, melainkan semacam rindu yang tak tahu kapan mulai tumbuh. Aku menyukai bagaimana alam berbicara tanpa suara—lewat embun yang jatuh pelan, angin yang menepuk daun, atau cahaya matahari yang menyelinap di antara ranting. Di sana, hidup terasa jujur.

Aku sering membawa kamera, merekam potongan momen yang mungkin tak berarti bagi siapa-siapa. Kadang hanya pantulan cahaya di permukaan air, kadang suara serangga yang entah dari mana datangnya. Namun bagiku, semua itu seperti catatan kecil agar aku tidak lupa bahwa dunia ini masih punya tempat yang tenang.

Suatu hari, seorang teman mengenalkanku pada kenalan ayahnya, seorang pemilik kebun kopi di kaki Gunung Slamet, Banyumas. Di tengah hutan, tepat di samping kebun itu, berdiri sebuah tempat bernama Cuilan Swargi. Saat pertama kali datang ke sana, aku langsung jatuh cinta. Entah mengapa, di tempat itu aku merasa benar-benar hidup—seolah segala hal yang kusukai tentang alam bertemu dalam satu titik.
Awalnya, aku bahkan tidak tahu tempat itu ada. Temanku hanya bilang, "Kita mau ke curug," tanpa menjelaskan lebih jauh.
Langit masih basah oleh sisa malam, dan udara desa mengantar kami dengan lembut. Jalan menanjak melewati sawah yang berkilau diterpa cahaya pertama. Motor kami menyusuri perbukitan, diapit rimbun pepohonan dan suara ayam yang memanggil dari kejauhan. Setiap tikungan seperti membuka bab baru dari perjalanan yang belum tahu arah akhirnya.

Dan ketika akhirnya tiba, aku mengerti mengapa tempat itu dinamakan Cuilan Swargi—potongan kecil dari surga. Udara di sana bening dan dingin, beraroma kopi yang baru dipetik. Sungai mengalun di samping kebun, membawa suara yang menenangkan. Di sana, aku tidak perlu mencari alasan untuk tenang.

Beberapa bulan kemudian, aku kembali lagi. Kini, di tengah kebun itu telah berdiri sebuah slow bar kecil bernama Wangi Swargi, tempat mereka menyeduh kopi dari biji yang ditanam sendiri. Namanya terasa pas: wangi yang menenangkan, swargi yang berarti surga. Dan memang begitulah rasanya.

Setiap cangkir kopi di Wangi Swargi seperti mengembalikan kita pada kesederhanaan yang lama hilang. Tak ada ambisi besar, tak ada kesibukan palsu—hanya aroma kopi, udara sejuk, dan perbincangan yang mengalir pelan. Kopi di sini bukan sekadar hasil bumi, melainkan hasil hidup: dari tanah yang subur, tangan yang sabar, dan hati yang jujur.

Yang membuatku terkesan bukan hanya kopinya, tetapi semangat orang-orang di baliknya. Setiap minggu, mereka mengadakan kelas bahasa Inggris gratis untuk anak-anak desa. Bayarannya sederhana: hasil bumi. Jika tak mampu, tak apa. Yang penting adalah keinginan untuk belajar. Di tempat yang jauh dari kota, mereka menanam harapan seperti menanam kopi—perlahan, tetapi pasti tumbuh.
Bahan-bahan di Wangi Swargi pun diambil dari kebun sekitar: gula jawa, daun rempah, dan hasil bumi lokal. Aku pernah melihat sendiri bapak-bapak mengantar gula jawa ke sana. Ada rasa gotong royong yang kini terasa langka, sesuatu yang hanya tumbuh dari tanah yang dijaga dengan cinta.

Di Cuilan Swargi, tidur berarti ditemani suara sungai, dan bangun berarti disambut kabut lembut di depan mata. Malam-malamnya dihangatkan oleh api unggun, tawa yang tidak berlebihan, dan cerita-cerita yang lahir dari kesederhanaan. Di sana, waktu terasa lebih pelan, dan manusia terasa lebih manusia.
Tak jauh dari Cuilan Swargi, ada dua curug yang sering kukunjungi: Curug Cidadap dan Curug Semaya. Untuk mencapai Cidadap, aku harus trekking dan menuruni sungai. Jalannya licin, bebatuannya dingin, tetapi setiap langkah terasa berharga. Airnya biru sebening kaca, memantulkan langit dan pepohonan di sekitarnya.

Curug Semaya terletak lebih tinggi. Dalam perjalanan ke sana, temanku Zaki dan Lukman—dua warga lokal yang hangat—mengenalkanku pada berbagai pohon: kolang-kaling, nira, hingga pohon aren tempat gula jawa berasal. Di tengah perjalanan, aku juga bertemu seorang bapak yang sedang mengantar gula jawa ke Cuilan Swargi. Kami bertegur sapa, dan aku salim dengan hormat—unggah-ungguh kecil pada orang yang lebih tua.

Di tengah perjalanan pulang, hujan turun lebih deras. Kami berteduh di sebuah saung milik pekerja getah karet. Di sana aku bertemu seorang lelaki muda, usianya tak jauh dariku. Kami berbincang tentang pekerjaan, tentang harga getah yang naik-turun, dan tentang hidup yang tetap harus dijalani, seberapa pun beratnya. Ada kesahajaan di mata mereka—cara hidup yang tak banyak kata, tetapi kaya makna.
Sore itu, setelah hujan reda, kami kembali ke kabin. Aku duduk di depan Wangi Swargi, di tepi sungai yang berdesir tenang. Zaki memetik gitar, lalu kami bernyanyi bersama lagu dari Kolektif AMPSKP berjudul Dendang Berlawan.

“Bila kau datang dengan modal kerakusan, untuk hadirkan macam-macam kerusakan, kami... kami akan melawan.”

Nada dan kata-kata itu bergema di udara, menembus kabut yang turun perlahan dari lereng Gunung Slamet. Lagu itu bukan sekadar nyanyian, melainkan seruan lembut dari masyarakat kecil yang berdiri di garis depan antara manusia dan alam—sebuah perlawanan terhadap proyek-proyek tambang dan pembangunan yang mengancam kelestarian Banyumas dan sekitarnya.

Aku ikut bernyanyi sambil menatap air sungai yang beriak. Di antara aroma kopi, kabut, dan petikan gitar, aku merasa lagu itu menjadi gema dari apa yang selama ini kucari: cara untuk hidup selaras.

Mungkin itulah arti Cuilan Swargi yang sesungguhnya—sepotong kecil dari surga, tempat manusia belajar kembali mencintai bumi dan segala isinya, tanpa perlu memilikinya.

Penulis: Alif Reyhan



Ilustrasi: ChatGPT

Travelogue to Mentawai Island



Foto: Indra Sarubei

Perjalanan ke Mentawai bagiku adalah petualangan yang luar biasa penuh keindahan alam sekaligus tantangan menuju pedalaman. Aku memulainya dengan naik kapal dari Padang, menembus laut lepas dengan ombak yang kadang besar, sebelum akhirnya tiba di pulau-pulau kecil yang belum banyak disentuh modernitas.

Setibanya di Mentawai, perjalanan berlanjut ke pedalaman hutan lebat. Jalan yang kulalui belum sepenuhnya beraspal, membawa aku masuk ke desa-desa tradisional yang sunyi dan teduh. Di sinilah para Sikerei—penjaga spiritual dan budaya—hidup dan menjaga harmoni antara manusia dan alam. Rumah-rumah adat beratap rumbia berdiri di antara pepohonan hijau, dengan jalan setapak yang membelah rimbun hutan. Suasananya jauh dari kebisingan, terasa sangat berbeda dari kehidupan kota.

Di sana, aku menyaksikan ritual Sikerei yang khidmat. Mereka duduk melingkar, dengan daun-daun segar di tengah sebagai simbol kehidupan dan alam. Warna-warni busana tradisional, hiasan kepala dari bulu dan manik-manik, serta tato khas di tubuh mereka menambah kekayaan budaya yang terasa hidup dan autentik.

Meski akses menuju tempat ini tidak mudah, perjalanan ini benar-benar mengingatkanku betapa pentingnya menjaga alam dan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun. Mentawai tidak hanya menawarkan keindahan, tetapi juga menghadirkan cara hidup yang selaras dengan bumi. Bagiku, pergi ke Mentawai bukan sekadar liburan, melainkan sebuah pengalaman yang mengajarkan makna hidup yang lebih sederhana dan utuh dan selaras dengan bumi..

Penulis: Indra Sarubei



TRIVIA FORESTRI

"Tahukah Kamu
Tentang Hutan Kita....?"

1,6 MILIAR ORANG HIDUP DARI HUTAN!

Lebih dari 25% populasi dunia menggantungkan hidupnya pada hutan. Dari bahan makanan, obat tradisional, hingga sumber air bersih. Semuanya bersumber dari ekosistem hutan. Jadi, menjaga hutan sama dengan menjaga kehidupan manusia.

Hutan bisa berbicara....?

Bisa, dengan memanfaatkan mikoriza!



Di bawah tanah, akar-akar pohon ternyata saling terhubung lewat jaringan jamur mikoriza. Melalui jaringan ini, pohon tua bisa "**mengirim pesan"** dan berbagi nutrisi ke pohon muda. Dalam dunia ilmiah, jaringan ini disebut "***Wood Wide Web***". Mirip seperti internet alami di bawah hutan!

46,9% **Pasokan kayu Nasional !**

Hutan rakyat di Indonesia berperan besar dalam memasok 46,9% kebutuhan kayu lokal nasional. Mayoritas berasal dari Pulau Jawa, terutama jenis sengon, mahoni, jati, jabon, dan sonokeling. Jadi, bukan hanya hutan negara yang berjasa menjaga keberlanjutan pasokan kayu kita.

Infografis/narasi: Siti Nurjanah

Hutan dan Keajaibannya: Antara Langit, Tanah, dan Api



Beberapa Pohon Pernah ke Bulan!

Tahun 1971, misi Apollo 14 NASA membawa benih pohon ke luar angkasa yang kemudian tumbuh di Bumi sebagai "***Moon Trees.***"



Penjaga Keanekaragaman Hutan Tropis

Penelitian Smithsonian Tropical Research Institute menemukan bahwa keberadaan penyakit jamur alami menjaga keseimbangan hutan tropis



Api, Musuh Sekaligus Sahabat Hutan

Api membantu regenerasi hutan dengan membuka biji pinus agar kehidupan baru tumbuh dari abu.

HUTAN INDONESIA
DALAM ANGKA

Data (Tahun 2024–2025)

Luas kawasan hutan Indonesia
125,54 juta hektar
(65,9% daratan)

Luas Perhutanan Sosial
8,1 juta hektar

Jumlah Kelompok Usaha (KUPS)
14.737 unit

Nilai ekonomi nasional dari Perhutanan Sosial
Rp1,398 triliun

Luas hutan rakyat
34,8 juta hektar

Desa sekitar hutan
>25.000 desa

Quiz

Seberapa "Hijau" Pengetahuanmu?

1. **Apa nama jaringan alami di bawah tanah yang menghubungkan akar-akar pohon?**
   a) Root Net
   b) Wood Wide Web
   c) Forest Fiber
   d) Green Link

2. **Berapa persen kebutuhan kayu nasional Indonesia dipasok dari hutan rakyat?**
   a) 25%
   b) 46,9%
   c) 60%
   d) 75%

3. **Benih pohon yang pernah ke luar angkasa dibawa oleh misi apa?**
   a) Apollo 13
   b) Apollo 14
   c) Skylab
   d) Artemis I

4. **Istilah "Wana Kayana Sembada" untuk menggambarkan apa?**
   a) Hutan adat di Kalimantan
   b) Visi Sosial Forestri 2045
   c) Sistem ekonomi hutan digital
   d) Proyek reboisasi di Jawa

SUMBER

Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN). (2025). FOREST CULTURE Edisi Gerak Baru. Bogor: LATIN.
Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN). (2021). Kehutanan 2045 adalah Sosial Forestri. Bogor: LATIN.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2024). Info Statistik Kehutanan Indonesia.
Smithsonian Tropical Research Institute. (2020). Fungal Diversity in Tropical Forest Ecosystems.
NASA History Office. (1971). Apollo 14: The Moon Tree Project.
Stand for Trees. (2023). Forest Facts and Climate Insights.
Click a Tree. (2023). 10 Fun Facts About Forests.

Infografis/narasi: Siti Nurjanah

FOREST CULTURE



DAPATKAN EDISI LAINNYA DISINI:

https://latin.or.id/e-magazine/

SCAN HERE

3 5 4 6 8 9 5 0 1 8 7 8 4